

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu gender menjadi permasalahan dalam sektor sosial, yang masih didiskusikan dan juga dicari penyelesaiannya hingga saat ini. Permasalahan gender yang kompleks dengan budaya dan norma yang berlaku, menyebabkan banyak pro kontra didalamnya. Seperti permasalahan mengenai peran gender di masyarakat, yang diharapkan dapat menemukan titik kesetaraan, namun masih belum mampu didapatkan seutuhnya.

Konsep gender adalah sebuah konsep budaya yang menciptakan perbedaan pada posisi, peran, mentalitas, perilaku, dan juga karakteristik emosi sosok perempuan dan laki-laki, di lingkungan masyarakat (Sasmita, 2017, hal. 128). Gender memiliki ciri dan sifat yang bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan tempat dan waktu serta mengacu pada budaya yang terdapat pada laki-laki dan perempuan.

Menurut Jorgi (Putra, 2021, hal. 1), peran gender merupakan sekumpulan tugas yang harus dikerjakan oleh pihak laki-laki dan perempuan, yang mana aturannya diciptakan berdasarkan keyakinan, kepercayaan dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Adanya peran gender ini membuat masyarakat mengkotak-kotakan atribut, peran, dan kewajiban dari perempuan dan laki-laki. Bahkan hal tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwa setiap gender tidak bisa melakukan peran dari gender lain, terutama pada perempuan.

Permasalahan gender sudah menjadi permasalahan umum dunia, dengan tingkat keparahan yang berbeda di setiap negara. Salah satu negara dengan permasalahan gender yang mengakar adalah negara India. India menjadi negara dengan tingkat diskriminasi gender tertinggi, di mana ketimpangan gender menjadi isu yang mendesak yang merugikan kehidupan perempuan di sana.

Dilansir dari *website* care India (CareIndia, 2023) terdapat beberapa bidang yang menjadi contoh utama dalam diskriminasi gender terhadap perempuan, yaitu kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan, posisi politik, kesehatan dan gizi yang

buruk jika dibandingkan dengan laki-laki dan kekerasan pada perempuan. Beberapa faktor penyebab dari ketimpangan gender di India, yaitu kemiskinan, peraturan patriarki, kurangnya pendidikan dan buta huruf, kurangnya kesadaran di kalangan perempuan, adat istiadat, keyakinan, dan praktik sosial.

Sistem kasta yang berkaitan dengan tradisi keagamaan, menjadi alat yang digunakan dalam tindakan diskriminasi terhadap perempuan di India. Terdapat empat kasta yang biasanya dikenal di India, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat kasta lain bernama kasta Dalit, kasta yang dikenal dengan kasta “*untouchables*” atau kasta yang paling rendah di India. Kasta Dalit merupakan kasta yang sering mengalami tindakan diskriminasi oleh masyarakat, bahkan bayangan dari kasta ini dianggap “haram” (Fikriansyah, 2024). Kasta Dalit sendiri tersebar di banyak daerah di India, khususnya daerah pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Masalah diskriminasi gender ini banyak ditemui di utara India, seperti Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, dan Madhya Pradesh (Yoseph & Hasugian, 2018).

Diskriminasi yang diterima oleh kasta Dalit sangat merugikan perempuan, tak hanya menjadi korban pelecehan oleh kasta yang lebih tinggi, perempuan berkasta Dalit juga sering dibunuh secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Dikutip dari data PBB (Fikriansyah, 2024), sekitar 1.000 kasus pembunuhan terjadi setiap tahunnya karena permasalahan sistem kasta yang masih dianut oleh masyarakat India.

Pemerintahan India tidak tinggal diam, pada tahun 2011 Mahkamah Agung India menetapkan hukuman mati kepada orang yang sudah melakukan pembunuhan karena permasalahan kasta. Namun hal tersebut hanya dianggap angin lalu oleh masyarakat, karena penindasan, pelecehan, dan pembunuhan masih tetap terjadi (Fikriansyah, 2024). Selain sistem kasta, budaya patriarki yang sangat kental di India juga menjadi faktor penyebab terjadinya diskriminasi gender.

Permasalahan diskriminasi gender ini menyebabkan India disebut sebagai negara yang berbahaya bagi perempuan. Berdasarkan sebuah survei, yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation yang dirilis pada tahun 2018 (E.M & A.L, 2018), India memiliki banyak faktor buruk untuk perempuan, yaitu dari layanan kesehatan, sumber daya ekonomi, praktik-praktik tradisional, pelecehan seksual, hingga

perdagangan manusia. Terbukti pada tanggal 3 maret 2024, seorang turis spanyol diperkosa oleh tujuh pria di India (Aulia, 2024).

Meskipun negara India terkenal dengan budaya Patriarkinya, namun masih ada daerah yang menganut budaya matriarki, yaitu suku Khasi dan Garo yang berada di daerah India Timur atau Meghalaya. Dalam Suku Khasi wanita menjadi orang yang paling penting, yang mana mereka memiliki wewenang dalam urusan sosial-ekonomi hingga manajemen rumah tangga. Sedangkan suku dalam suku Garo, laki-laki masih memiliki wewenang sebagai pemimpin, namun wanita tetap menjadi yang utama (Nursetiawati, 2020).

Diskriminasi gender juga merupakan hasil dari pengkotak-kotakan gender yang mana maskulin hanya untuk laki-laki dan feminim untuk perempuan. Hal tersebut menciptakan stereotif gender, di mana laki-laki harus memiliki sifat maskulin yang kuat, tegas, tidak emosional, dan berkuasa. Sedangkan perempuan dituntut untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, penyayang, hangat, dan mengutamakan perasaan.

Kontruksi sosial tersebut menghasilkan permasalahan yang merugikan salah satu gender, dan berujung mengakarnya kesenjangan gender di masyarakat. Kondisi sosial tersebut menjadi alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Stereotif gender yang mengukung, membuat pemikiran masyarakat sulit untuk berkembang, dan hal tersebut menghasilkan sistem sosial yang tidak adil seperti patriarki. Untuk memerangi hal tersebut, maka munculah feminisme yang menuntut kesetaraan gender.

Banyak cara yang dilakukan oleh aktivis feminisme untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai isu-isu gender, mengkritik ketidakadilan sosial, dan mengawal perubahan demi terwujudnya kesetaraan gender yang adil bagi semua pihak. Isu kesetaraan ini sudah banyak disuarakan dibanyak negara dengan berbagai macam cara. Seperti gerakan *Woman's March* yang dilakukan pada 21 januari 2017, di Washington D.C, di mana gerakan ini memberikan pemahaman mengenai bentuk feminisme baru. Mengutip dari jurnal yang berjudul "*The 2017 Women's March on Washington: An Analysis of Protest-Sign Messages*" (Weber et al., 2018), gerakan *Woman's March* dibuat bermakna oleh para peserta yang mempunyai pengetahuan

tentang bentuk feminisme baru, dan menekankan pentingnya memahami dampak sosialnya yang mendalam dan luas.

Selain dengan gerakan pawai, para pelaku seni akan menyuarakan kesetaraan gender ini melalui musik, buku, dan film. Salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu gender, yaitu dengan merepresentasikan sosok perempuan maskulin yang mampu melakukan peran laki-laki melalui sebuah film.

Film termasuk media dalam komunikasi massa, di mana film memiliki fungsi sebagai media yang menyebarkan informasi kepada khalayak, memberikan edukasi, dan bisa menjadi kontrol sosial (Ardianto et al., 2019). Sebagai media massa, film banyak digunakan untuk mengangkat isu sosial yang terjadi di masyarakat, salah satunya seperti isu gender.

Terdapat beberapa film India yang mengangkat dan merepresentasikan maskulinitas perempuan yang disuarakan untuk menghancurkan diskriminasi gender di India (Najmah, 2020), berikut ini beberapa film tersebut:

1. *Soni* (2012)

Film *Soni* mengangkat isu kekerasan sosial yang mana pemeran utama dalam film ini adalah seorang perwira wanita yang sering dilecehkan dan diremehkan.

2. *Gulaab Gang* (2014)

Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang menjadi pemimpin dari kelompok pembela kaum perempuan yang bernama *Gullab Gang*. Dalam film tersebut menceritakan tentang usahanya naik ke dunia politik untuk menyuarakan hak perempuan.

3. *Mardaani* (2014)

Seorang polisi perempuan yang mampu memburu pelaku perdagangan manusia di daerahnya. Karakter polisi perempuan yang tak kenal takut mampu membungkam anggapan bahwa wanita tak mampu bekerja dengan baik.

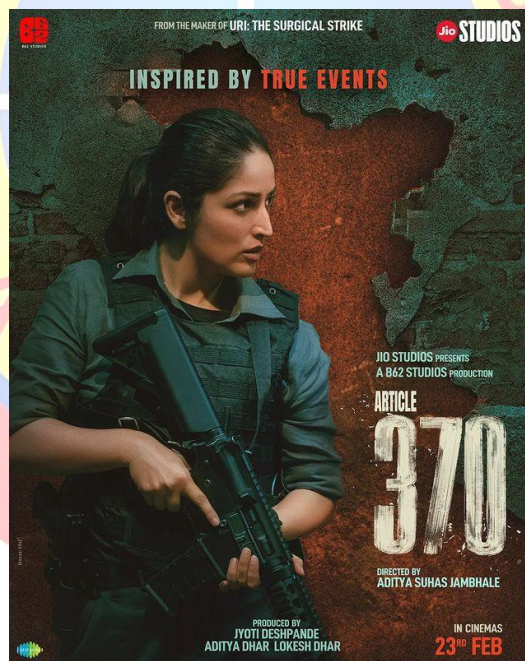
4. *Raazi* (2018)

Tokoh utama dalam film ini merupakan seorang perempuan yang menjadi mata-mata yang di utus oleh India untuk memata-matai negara paskistan.

Film-film diatas merepresentasikan bahwa wanita bisa melawan ketidakadilan, dan mampu bekerja di bidang-bidang yang di dominasi oleh pria.

Dalam penelitian ini peneliti memilih film *Article 370* sebagai objek penelitian, dalam merepresentasikan maskulinitas dari perempuan. Film ini merupakan film Bollywood bergenre *political action thriller* tentang perjuangan seorang agen lokal perempuan bernama Zooni Haksar dalam menjalankan misinya untuk menindak terorisme dan mengakhiri konflik ekonomi. Agen tersebut bekerja sama dengan seorang pegawai dari kantor perdana menteri, yaitu Rajeshwari Swaminathan untuk sama-sama memberantas ketidak adilan, dengan berusaha untuk mencabut pasal 370.

Gambar 1. 1 Poster Film Article 370



Sumber: Website IMDb

Film karya Aditya Suhas ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di India, yang dikenal sebagai kejadian pasal 370. Aditya Dhar, Arjun Dhawan, dan Aditya Suhas Jambhale merupakan sekumpulan penulis yang membawa isu politik, dari pasal 370 yang kompleks menjadi sebuah film yang penuh dengan konflik.

Adegan aksi yang berbahaya, serta perseteruan internal para pejabat negara membuat film ini disajikan dengan penuh ketegangan.

Selain memiliki alur yang menarik, film ini diperankan aktor dan aktris terkenal yaitu Yami Gautam, Priyamani, Mohan Agshe, Kiran Karmarkar dan lain-lain. Rilis pada 23 Februari 2024, film ini tentang politik ini berhasil mengantongi \$13,222,021 *Gross worldwide* dengan rating 83% di *website Rotten Tomatoes* (Tomatoes, 2024). Meskipun film ini memiliki genre *political action thriller* dan banyak kontroversi terkait isu yang diambil, namun banyak masyarakat yang antusias serta menikmati film tersebut (Srivastava, 2024).

Karakter perempuan dalam film ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki tujuan yang teguh, mandiri, pemberani, cerdas, tegas, kuat, dan bertanggung jawab. Karakteristik dari tokoh perempuan dalam film ini, merepresentasikan konsep dari maskulinitas yang sesuai dengan konsep gender. Apalagi film *Article 370* ini berasal dari negara India, di mana negara tersebut memiliki permasalahan isu gender yang sangat mengakar dan sudah parah. Hal tersebut membuat film ini sengaja dibuat, dengan mengedepankan karakter perempuan yang hebat, tangguh, mampu memimpin, dan mampu menjadi pribadi yang mandiri.

Sama halnya di Indonesia yang kondisi masyarakatnya masih menganggap sepele isu gender. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam persentase proporsi pekerjaan, posisi tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan perempuan di bidang pekerjaan hanya 24,40% sedangkan laki-laki mencapai 75,6% (Badan Pusat Statistik, 2023, hal. 85). Selain itu, proporsi perempuan pada posisi manajerial masih tertinggal jauh dari laki-laki. Pada tahun 2022, sebesar 25.57 persen perempuan yang bekerja pada posisi manajerial. Sedangkan sebesar 74.43 persen ditempati oleh laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2023, hal. 91). Posisi manajerial mengacu pada jenis pekerjaan pada Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia atau biasa disebut KBJI 2014.

Dalam KBJI 2014, golongan pokok manajer posisi atas yaitu oimpinan eksekutif, pejabat tinggi pemerintah, dan pejabat pembuat peraturan perundang-undangan, manajer administrasi dan komersial, manajer produksi dan pelayanan

khusus, manajer jasa perhotelan, perdagangan, dan jasa lainnya (Badan Pusat Statistik, 2023, hal. 90). Kondisi tersebut membuat peneliti tertarik menjadikan film ini sebagai subjek penelitian. Peneliti berharap, dengan adanya penelitian mengenai permasalahan sosial ini, dapat memberikan pemahaman lain mengenai maskulinitas pada sosok perempuan.

Jika masyarakat mulai paham dan membuka pemikirannya mengenai maskulinitas perempuan, ini akan menjadi angin segar bagi korban patriarki yang mana akan melepaskan mereka dari tuntutan konsep gender yang merugikan. Pemikiran masyarakat yang berkembang dan berubah, akan membuat masyarakat mulai menghentikan stereotif gender yang salah, dan akan mulai menyuarakan kesetaraan gender agar tidak ada lagi diskriminasi gender.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seperti apa representasi maskulinitas perempuan dalam sebuah film, yang mana konsep gender ini masih diperdebatkan oleh masyarakat. Tentunya penelitian ini membutuhkan penelitian yang mendalam, oleh karena itu peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa semiotika dari John Fiske. Peneliti akan melakukan analisis dengan tiga level kode, yaitu level realitas, representasi, dan level ideologi (Aryanto et al., 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanda dan simbol yang ada pada film *Article 370*, yang menggambarkan maskulinitas perempuan dianalisis menggunakan teori semiotika John Fiske.

1.3 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana representasi kode maskulinitas perempuan dalam level realitas John Fiske pada film *Article 370*?
2. Bagaimana tanda maskulinitas perempuan digambarkan dalam level representasi, pada film *Article 370*?

3. Seperti apa kode-kode level ideologi menurut John Fiske yang terdapat pada film *Article 370*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seperti apa representasi kode maskulinitas perempuan dalam level realitas John Fiske pada film *Article 370*.
2. Untuk mendeskripsikan tanda maskulinitas perempuan digambarkan dalam level representasi pada film *Article 370*.
3. Untuk mendeskripsikan seperti apa kode-kode ideologi menurut John Fiske yang terdapat pada film *Article 370*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu komunikasi secara umum.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang. Serta dapat menjadi referensi dalam bidang ilmu komunikasi, terutama dalam analisis tanda dan simbol yang ada pada ilmu semiotika.

Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu komunikasi secara umum. Selain itu diharapkan dapat memunculkan pemahaman baru dalam ilmu pengetahuan, bahwa film sebagai media komunikasi dapat dipahami dengan berbagai cara, tergantung persepsi dan latar belakang budaya dari masing-masing individu.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk masyarakat dalam memahami konsep gender, terutama konsep

maskulinitas perempuan dan perkembangannya pada saat ini. Serta, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang representasi maskulinitas pada perempuan dalam film *Article 370*, yang mana diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis semiotika John Fiske. Berikut sistematika penulisan dengan metode penelitian kualitatif:

- BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan penelitian, lokasi dan waktu penelitian.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari ringkasan hasil tinjauan pustaka, rangkuman teori-teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, dan juga kerangka pemikiran.
- BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari pendekatan penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V PENUTUP, terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi serta melakukan analisis pada sebuah Film yang berjudul *Article 370*, yang mana dalam penelitian ini tidak membutuhkan lokasi atau tempat khusus. Peneliti melakukan penelitian di lokasi yang terdapat perangkat mumpuni untuk mengakses film, yang menjadi subjek penelitian peneliti.

1.7.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu empat bulan, terhitung dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Adapun Jadwal penelitiannya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
1	Observasi					
2	Penyusunan Usulan Penelitian dan Bimbingan					
3	Pengumpulan Data					
4	Analisis Data					
5	Penyusunan Laporan					
6	Sidang Skripsi					

